

# SITUASI SOSIAL-BUDAYA INDONESIA 1976

AMW PRANARKA

## SITUASI SOSIAL

APAKAH DAPAT DIKATA tentang situasi sosial di negeri ini selama tahun 1976? Berdasarkan pengamatan serta catatan<sup>1</sup>, dapat dikatakan bahwa masalah-masalah sosial nampaknya telah memberi warna yang semakin tajam di sepanjang tahun ini. Secara langsung maupun tidak langsung hal ini tercermin dari berbagai macam peristiwa dan kegiatan dari berbagai lingkungan: di dalam ulasan-ulasan persurat-kabaran, di dalam seminar dan diskusi-diskusi, di dalam pertemuan-pertemuan sampai kepada gerakan-gerakan politik.

Pada awal tahun 1976 orang banyak berbicara mengenai hutang-hutang Pertamina. Peristiwa ini banyak dirasa bagaikan satu kejutan nasional. Adanya side-effects dari persoalan ini tentu saja menyebabkan masalahnya menjadi panas dan kompleks.

Bersamaan dengan suasana ini banyak dibahas masalah-masalah sekitar bantuan dari luar negeri. Masalahnya tidak lagi hutang Pertamina, akan tetapi hutang negara ini sendiri, yang dikemukakan sebagai bencana nasional yang bakal menimpa masyarakat ini. Terdengar satu pendapat yang mengatakan bahwa dengan semua itu Indonesia telah menggadaikan dirinya.

Peranan modal asing mendapat sorotan pula. Sementara orang beranggapan bahwa masuknya modal asing ke Indonesia ini pada hakekatnya hanyalah akan membawa malapetaka sosial belaka. Modal asing tidak lain adalah perbekalan baru dari kekuatan kapitalis yang semakin mau menguasai dunia.

---

<sup>1</sup>Tulisan ini disusun berdasarkan sumber-sumber dari Ringkasan Peristiwa yang diterbitkan oleh CSIS, serta dengan menggunakan bahan-bahan clipping pada perpustakaan CSIS.

Contoh yang banyak dikemukakan sebagai gejala yang frappant adalah Multi National Corporation (MNC). Kekuatan ini berusaha menguasai pasar dunia, dan untuk itu berusaha mengadakan investasi-investasi yang padat modal disertai dengan teknologi tinggi, yang orientasinya adalah menguasai pola konsumsi tinggi. Masuknya modal asing dengan sendirinya akan membawa akibat terjadinya kepincangan sosial, terutama membesarnya jurang antara lapisan kecil yang kaya dan lapisan miskin yang semakin meluas, jurang antara elite politik dan massa rakyat. Modal asing banyak dirasakan sebagai satu ancaman, yang akan memecah kehidupan bangsa, baik secara sosial maupun secara politik.

Masih berkenaan dengan itu selama tahun 1976 ini orang juga banyak membahas masalah kemiskinan. Orang berbicara tentang poverty line. Banyak dikemukakan bahwa sebagian besar rakyat kita masih hidup di bawah apa yang dinamakan poverty line tersebut. Suasana ini dengan sendirinya membawa banyak perhatian kepada masalah kependudukan, sebab gambaran umum adalah bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tiap tahun berkisar sekitar 2,37%, yang berarti masih akan merupakan beban yang sangat berat untuk pembangunan nasional.

Di samping pemikiran-pemikiran sosial yang bersifat mendasar dan konsepsional, terdapat pula pembahasan-pembahasan sekitar masalah yang lebih konkrit. Dalam tahun 1976 terjadi kontroversi sekitar menolak atau menerima televisi berwarna. Soal perumahan dan tanah juga banyak diperbincangkan. Kalau tahun-tahun yang lalu perhatian ditujukan kepada mobil-mobil mewah sebagai gejala a-sosial, maka tahun ini orang berbicara mengenai mobil-mobil pribadi sebagai gejala yang sama. Dengan latar belakang masalah kaya miskin itu, kritik sosial sampai pula membahas masalah pemeliharaan anjing sebagai simbol hidup mewah.

Sebagaimana biasa, di dalam suasana ini muncul lagi kontroversi sekitar kue nasional: yang satu mengemukakan bahwa kue perlu diperbesar dahulu untuk kemudian dibagi merata; yang lain mengatakan bahwa kue nasional harus segera dibagi, betapapun kecilnya kue itu; sementara yang lain lagi menanyakan: memang kue perlu diperbesar, akan tetapi adakah kesediaan membagi-bagikan kue itu kalau sudah besar, sebab bukankah manusia pada dasarnya adalah serakah dan dipenuhi oleh nafsu-nafsu diri?

Suasana itu semua memberikan warna yang khas di sepanjang tahun 1976. Ia juga menimbulkan suatu kabut pesimisme yang sedikit banyak cukup mempengaruhi keadaan masyarakat. Sekurang-kurangnya sangat terasa adanya situasi tegangan antara optimisme pembangunan dan pesimisme proses sosial. Ada beberapa kristalisasi pokok-pokok pikiran yang nampak menjiwai suasana pesimisme tersebut:

1. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih sangat berat untuk memungkinkan terciptanya kesejahteraan.
2. Situasi keuangan negara semakin suram, hal mana menggejala di dalam kasus Pertamina dan masalah hutang-hutang negara.
3. Pembangunan Indonesia membuka diri untuk masuknya kekuatan modal asing, sehingga membawa masuknya kapitalisme, yang akan mengakibatkan terjadinya perpecahan politik maupun perpecahan sosial, khususnya membesarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin.
4. Aparatur pemerintah sebagai alat kepemimpinan nasional nampaknya mengalami proses perapuhan.

Keadaan semacam ini menyebabkan banyak kegiatan pemikiran berkembang di bidang sosial selama tahun 1976. Banyak dibahas teori-teori dan ajaran-ajaran sosial, dengan berbagai sifat, corak pendekatan dan motivasi. Orang mencari definisi kesejahteraan, indikator-indikator sosial, memasalahkan poverty line, equity dan distribusi.

Refleksi dunia pemikiran berkenaan dengan suasana yang diwarnai oleh masalah sosial ini dapat kita temukan misalnya saja di dalam majalah Prisma No. 1 bulan Pebruari 1976; di dalam buku Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang berjudul: Indonesia dalam Perkembangan Kini dan Masa Datang dan di dalam pidato pengukuhan Prof. Emil Salim sebagai Guru Besar tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sementara itu dari luar negeripun nampak ada yang ikut melibatkan pemikiran ke dalam masalah sosial di Indonesia. Di Amerika kecenderungan analisa lebih ditujukan kepada masalah distribusi dan equity. Di Eropa continental terdapat kecenderungan analisa yang bersifat konseptual, seperti terdapat di dalam kritik sosial yang dikembangkan oleh penganut aliran Neo Marxisme, khususnya dalam menerapkan pandangan-pandangan itu kepada sistem

global dan kepada situasi negara-negara berkembang. Penerbitan yang secara langsung berkenaan dengan Indonesia adalah tulisan Prof. Wertheim berjudul *Elite en Massa*. Sementara itu ada pula tulisan-tulisan yang sifatnya lebih sensasional dan argumentasinya bercorak 'ad hominem' (atau lebih tepat "ad homines"), sebagaimana tercermin di dalam berita tentang Sepuluh Orang Terkaya di Indonesia dan di dalam tulisan Richard Smith di dalam majalah Newsweek. Masih perlu dicatat bahwa di luar negeri beredar pula pamflet-pamflet analisa yang memuat kritik-kritik atas situasi sosial di negeri ini, yang ditulis oleh kaum komunis.

Tetapi refleksi yang harus dicatat, yang membuat warna sosial itu lebih menyala dalam tahun 1976 ini, adalah apa yang dinamakan Peristiwa Sawito. Di sini masalah sosial telah menjadi pertimbangan satu 'political will', meskipun formatnya masih kecil. Titik berat pertimbangan-pertimbangan utama dari gerakan ini adalah masalah-masalah sosial, meskipun efek-efek yang ingin dicapai nampaknya adalah efek-efek politik.

APAKAH HARUS DIKATA tentang situasi sosial di Indonesia selama tahun 1976 itu?

Pertama-tama kita tidak perlu merasa terkejut ataupun was-was mengenai semakin menonjolnya masalah-masalah sosial ini. Masalah-masalah ini akan semakin mewarnai perkembangan masyarakat kita. Ditinjau dari aspek dialektik pembangunan hal tersebut adalah satu proses yang sangat wajar. Dengan proklamasi dan konstitusi kita memang sengaja menuju kepada kesejahteraan. Orde Baru, dengan politik pembangunannya, secara jelas dan sadar berusaha mewujudkan itu. Masalah-masalah sosial itu semua timbul, bukan dikarenakan oleh sikap yang tidak mau memberi perhatian kepada kesejahteraan rakyat, akan tetapi justru dari pola politik yang bertekad memberikan perhatian kepada kesejahteraan.

Mungkin memang terasa tragis dan cukup memprihatinkan, bahwa tegangan antara optimisme pembangunan di satu pihak dan pesimisme proses sosial menjadi semakin tinggi kadarnya justru di dalam perkembangan dasawarsa orde baru. Bahkan sedemikian jauh, sehingga terdapat anggapan seolah-olah di dalam 10 tahun orde baru ini di Indonesia tidak terjadi pembangunan. Anggapan yang demikian ini tentu saja satu ungkapan yang ekstrim. Situasi demikian ini dapat dijelaskan secara psikologis dan

politis. Secara psikologis dapat dipahami bahwa semakin kita mengajak masyarakat membangun dan sekali kita mulai membawa masyarakat kepada alam pembangunan, seterusnya kita akan menghadapi proses 'permintaan dan pemenuhan kebutuhan yang terus-menerus dan semakin meningkat'. Masalahnya bukanlah karena kita hidup semakin serba kekurangan, akan tetapi karena kita mulai tahu bahwa kita dapat mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lebih lagi; orang mulai tahu akan kemungkinan yang lebih banyak. 'Ingin lebih' adalah satu desakan psikologis yang akan timbul di dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa masalah-masalah sosial dengan sendirinya akan menjadi titik sentral di dalam perpolitikan. Setiap kekuatan politik harus dapat menunjukkan adanya persepsi atas situasi ini dan berusaha memberikan jawaban-jawaban kepada masalah ini. Setiap kekuatan politik harus mempunyai orientasi kepada pragmatisme sosial. Akan tetapi, karena kompleksnya permasalahan maka kekuatan politik akan lebih dimungkinkan pula untuk mempolitisir masalah-masalah sosial tersebut. Lingkaran setan akan selalu memberikan peluang luas untuk manipulasi-manipulasi.

Oleh sebab itu masalah pertama di dalam hal ini adalah masalah kriteria. Kriteria yang bagaimanakah? Karena pembangunan telah menjadi satu konsep kenegaraan, maka jelas sekali diperlukan adanya kriteria kenegaraan, artinya yang mempunyai kekuatan hukum, yang konstitusional. Bila hal ini tidak diterima persoalannya beralih kepada masalah menerima tidaknya secara prinsipial negara yang ada. Ditinjau dari aspek kenegaraan ini maka kriteria-kriteria itu terdapat di dalam proklamasi, konstitusi dan kemudian di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Komunikasi dalam tingkat kenegaraan haruslah berpijak pada kriteria-kriteria ini.

Persoalan-persoalan akan timbul, karena mengenai masalah sosial itu dapat dikemukakan berbagai opsi dan alternatif bahkan juga berbagai asumsi. Karena itu juga berbagai kriteria, seperti kriteria atas dasar fakta-fakta empiris ataupun kriteria atas dasar teori dan penelitian ilmiah. Bagaimanakah bila terjadi konflik antara kriteria kenegaraan di satu pihak dengan kriteria ilmiah ataupun kriteria faktual di lain pihak?

Suasana akan menjadi konflikatif apabila terjadi sikap-sikap sempit dan dogmatik, sehingga orang seakan-akan hanya menawarkan satu pilihan saja yang harus diambil: atau pendekatan kenegaraan atau pendekatan sosial. Sikap semacam ini bukan sekedar bahaya hypothetis akan tetapi satu kerawanan yang sangat riil. Sikap dogmatisme dan segala macam determinisme itu tidak akan membawa masyarakat kepada pemecahan persoalan.

Orang seharusnya tidak mengkonflikkan berbagai macam kriteria tersebut, akan tetapi memandang semua itu sebagai saling melengkapi. Dan bagi mereka yang paham akan konstitusi Indonesia akan melihat bahwa masalah ini sesungguhnya sudah ditampung, justru berkenaan dengan apa yang dinamakan GBHN itu. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan sebagai berikut:

"Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang Kedaulatan Negara, kekuasaannya tidak terbatas. Mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk kemudian hari".

Demikianlah sekedar ulasan tentang aspek kenegaraan masalah sosial. Yang makin penting tentulah masalah pemecahan yang lebih teknis dan operasional.

Apabila berbagai macam kriteria dan pendekatan itu sudah dapat dipandang sebagai komplementer yang satu terhadap yang lain, maka selanjutnya yang timbul adalah masalah alat analisa. Apakah alat analisa sosial yang paling baik? Di dalam hal ini sejarah masih juga terus bergulat mengumpulkan pengalaman-pengalaman. Dekade-dekade pembangunan PBB menunjukkan betapa para pemikir bergulat dengan masalah ini: berawal dengan pendekatan ekonomis sampai kepada pendekatan yang sifatnya lebih komprehensif, lebih multidisipliner. Bermula pada konsep kependudukan, pertumbuhan ekonomi sampai kepada konsep habitat akhir-akhir ini.

Berdasarkan alat analisa itulah akan dapat ditunjukkan kredibilitas. Bila hal ini tidak terjadi, masalah-masalah sosial yang semakin berat dan kompleks itu hanya akan dihadapi dengan permainan slogan dan demagogi belaka. Argumen-argumen yang bersifat 'ad hominem', 'generalisasi', 'latus hos' dan 'silat lidah' akan semakin berkecamuk. Dan ini tentu tidak akan membawa perbaikan sama sekali.

Inilah kiranya hikmah yang paling penting dari situasi sosial periode 1976 itu, ialah bahwa semakin kita mau maju semakin kita perlukan alat analisa sosial sebagai perlengkapan yang sangat menentukan.

Alat analisa ini akan menjadi senjata yang semakin penting untuk perjuangan bangsa: untuk merencanakan, untuk pelaksanaan, untuk menanggulangi efek-efek sampingan, maupun untuk menumbuhkan partisipasi. Adakah situasi sesungguhnya begitu pesimistik? Terdapatkah kekeliruan asumsi di dalam pemikiran-pemikiran? Semua ini perlu diteliti dan perlu diungkapkan. Oleh karena selama tahun 1976 telah terjadi kristalisasi pemikiran mengenai situasi sosial di Indonesia yang terdiri dari empat pokok pikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebaiknya diadakan analisa dan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya (atau yang sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari kenyataan), berkenaan dengan hal-hal tersebut:

1. Bagaimanakah keadaan sesungguhnya tentang laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dewasa ini?
2. Bagaimanakah dengan situasi keuangan negara? Sudahkah kejutan Pertamina dapat diatasi? Bagaimanakah mengenai hutang-hutang kita?
3. Bagaimanakah perencanaan pembangunan kita? Terutama yang berkenaan dengan penanaman modal, teknologi dan yang berkenaan dengan pemerataan kesejahteraan?
4. Bagaimanakah keadaan aparat yang harus mendukung kepemimpinan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional?

Banyaknya hal yang tidak diketahui, akan selalu dapat menjadi sumber ketakutan dan pesimisme. Kabut pesimisme di dalam masyarakat perlu dihilangkan. Untuk masyarakat yang sedang membangun, optimisme merupakan bekal yang sangat penting. Tentu saja optimisme yang didukung oleh data dan dijabarkan di dalam perwujudan.

## KEBUDAYAAN

Bagaimanakah dengan situasi kebudayaan? APAKAH DAPAT DIKATA tentang situasi kebudayaan di Indonesia sepanjang tahun 1976?

Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa pada tahun ini masalah pewarisan nilai-nilai banyak dibicarakan. Berkaitan dengan itu diperbincangkan masalah-masalah sekitar generasi muda. Begitu banyak hal-hal ini dibahas, sehingga timbul gejala-gejala kemuakan.

Pendidikan masih saja merupakan sumber keresahan kronis pada setiap akhir dan setiap permulaan tahun. Pembangunan SD-SD Inpres berjalan terus. Terdengar persoalan sekitar tenaga-tenaga pendidik untuk SD-SD tersebut. Timbul permasalahan lagi tentang dimensi kualitatif dan dimensi kuantitatif di dalam sistem pendidikan nasional. Fraksi Karya Pembangunan menyatakan pikirannya mengenai SD bebas SPP, yang di dalam pidato 17 Agustus 1976 dikuatkan oleh Presiden, sekurang-kurangnya mulai dengan kelas I, kelas II dan kelas III. Selama tahun 1976 banyak kegiatan dipusatkan pada pembaruan kurikulum. Dalam tahun 1976 ini dinyatakan berlakunya kurikulum baru yang dinamakan kurikulum 75. Pelaksananya masih memerlukan berbagai macam persiapan. Berkenaan dengan kurikulum 75 ini timbul beberapa persoalan, antara lain mengenai garansi kurikulum baru itu, dan tentang moral Pancasila di dalam kurikulum pendidikan nasional. Dalam pada itu dapat dicatat bahwa di dalam tahun 1976 ini terjadi pertemuan antara Presiden dengan pimpinan Musyawarah Perguruan Swasta, di mana dibicarakan tentang eksistensi, fungsi dan partisipasi perguruan swasta di dalam pendidikan nasional. Kemudian pada akhir tahun 1976 dan memasuki awal tahun 1977 terasa lagi keresahan kronis: penerimaan di Perguruan Tinggi maupun di tingkat sekolah lanjutan. Orang mulai berbicara tentang ledakan lulusan SD.

Masalah agama nampaknya tetap menjadi sumber kerawanan. Desas-desus dan pamflet-pamflet yang sifatnya gelap, berisikan pancingan adu domba antar agama dan kepercayaan, masih terus saja tersebar di masyarakat. Beberapa waktu sebelumnya polarisasi konflik terjadi terutama antara Islam dan Kristen (isu-isu kristenisasi). Dalam tahun 1976 ini menggejala polarisasi lain yaitu antara agama khususnya Islam dan kepercayaan, dengan



tema kembali ke agama. Kerukunan antar umat beragama yang nampak berkembang, masih tetap mengandung sifat ambivalens. Hal ini tercermin dari sukarnya membentuk apa yang dinamakan forum kerjasama antar umat beragama dan kepercayaan, yang diharapkan terdiri dari Majelis Ulama, MAWI, DGI dan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan. Masih ada hambatan-hambatan baik antar kelompok maupun intra kelompok masing-masing.

Selama tahun 1976 ini terasa adanya gejala radikalisasi gerakan-gerakan kritik dan oposisi dari lingkungan agama atau lingkungan spiritual pada umumnya. Dari kalangan spiritual ini, banyak terdapat aliran kritik sosial.

Di dalam tahun 1976 banyak juga dapat dicatat tentang kegiatan-kegiatan di bidang bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Tentang bahasa selama tahun itu terjadi dua kali seminar politik bahasa nasional. Tentang ilmu pengetahuan dapat dicatat terlaksananya seminar kedua mengenai ilmu sosial. Pada seminar yang pertama orang banyak membahas kedudukan ilmu-ilmu sosial di dalam pembangunan dan masalah metodologi, sedang di dalam seminar kedua ini banyak dibicarakan masalah etika di dalam pengembangan ilmu sosial. Sementara itu banyak orang berbicara mengenai pendekatan multidisipliner dan studi wilayah.

Mengenai teknologi, persoalan nampaknya masih tetap sama, yaitu sekitar transfer of technology dan pemilihan teknologi (appropriate technology). Masalah-masalah ini lebih banyak berkaitan dengan aspek sosial dari teknologi itu sendiri. Namun demikian nampak pula kesadaran akan aspek budaya dari masalah tersebut, yaitu tumbuhnya pendapat yang mengatakan bahwa di dalam soal transfer of technology ini azasnya haruslah kita sendiri menjadi kuat dari dalam. Teknologi harus menjadi bagian dari perkembangan kekuatan bangsa kita sendiri. Dengan perkataan lain teknologi menjadi masalah akulturasi.

Di bidang kesenian selama tahun 1976 ini ada beberapa yang dapat dicatat. Pertama mengenai munculnya artis-artis cilik. Kemudian mengenai film nasional. Berkenaan dengan dua gejala ini banyak didiskusikan tentang dimensi edukatif dan dimensi komersial dari apa yang dinamakan kesenian itu. Dalam pada itu masih terus diusahakan bagaimana kesenian tradisional dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan jaman. Dari lingkungan

seniman modern atau kontemporer terasa adanya daya kritik sosial. Sementara merasa bahwa perkembangan kesenian kita nampak kurang mantap.

Akhirnya dapat dicatat pula bahwa sepanjang tahun 1976 ini nampak keinginan akan adanya satu politik kebudayaan nasional yang jelas, yang terasa dinamikanya, yang terasa daya inspirasi dan daya geraknya. Orang berbicara mengenai strategi kebudayaan nasional. Bahkan terdengar sementara suara yang menginginkan adanya kongres kebudayaan nasional.

APAKAH HARUS DIKATA tentang situasi kebudayaan tersebut? Pertama-tama harus dikatakan bahwa adanya keinginan akan satu politik kebudayaan nasional, yang dirasa dinamikanya, yang dirasa daya inspirasi dan daya dorongnya, memang merupakan satu proses yang wajar di dalam perkembangan pembangunan. Apalagi karena di dalam alam pikiran Indonesia, pembangunan telah dirumuskan sebagai satu proses 'dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia'. Itu berarti bahwa pembangunan telah diletakkan di dalam satu konteks kulturil secara tegas. Sebab kebudayaan intinya adalah manusia. Pembangunan per definisi adalah satu proses humanisasi. Karena itu kebudayaan menjadi jantung dari apa yang kita namakan pembangunan tersebut, hal mana makin lama akan makin kita rasakan, meskipun masih sukar untuk diungkapkan secara refleksif, sistematis dan analitis, apalagi menjadi operasional. Situasi yang demikian itu juga menunjukkan bahwa masyarakat kita sedang berada di dalam fase transisi kulturil yang cukup berat. Transisi ini harus dihadapi. Untuk itu, sebagai satu bangsa dan satu negara, dirasakan perlunya strategi kebudayaan nasional.

Persoalan sekitar generasi muda dan pewarisan nilai, juga mencerminkan situasi masyarakat yang berada di dalam satu situasi transisi besar itu. Gejala kempakan yang terdapat menunjukkan bahwa situasi itu sudah terasa semakin kronis, namun demikian kita belum dapat menemukan diagnosa yang tepat apalagi terapinya. Dan memang kerap kali orang tidak sampai kepada inti persoalan secara fundamental dan radikal. Masalah pewarisan nilai dan masalah generasi muda bukanlah sekedar mempersoalkan apakah generasi tua memang lebih baik, atau apakah generasi muda selalu lebih perseburuk; juga bukan sekedar masalah ganja, narkotika dan kenakalan remaja, yang kemudian dibalas dengan teori perlunya pendidikan orang tua karena ada pula terdapat kenakalan orang tua. Ditinjau secara kulturil, masalah

ini menyentuh persoalan yang cukup gawat, yaitu historisitas, khususnya menentukan sikap di dalam menghadapi tegangan antara kontinuitas dan diskontinuitas. Situasi ini menjadi lebih intensif, karena kerap kali terkait dengan instik politik yang cukup besar pada lapisan elite Indonesia. Di samping itu ada juga pengaruh dari luar, khususnya dari masyarakat barat yang pada hakekatnya juga sedang berada di dalam dilemma pemilihan antara kontinuitas dan diskontinuitas tersebut, situasi mana pada tahap awalnya telah menumbuhkan "fashion modernity" di dalam alam pikiran yang intinya adalah radikalisme di dalam diskontinuitas, meskipun akhir-akhir ini aliran-aliran tersebut telah menjadi lebih wajar sifatnya.

Dengan bertitik tolak dari keyakinan kita mengenai bangsa Indonesia sebagai satu subyek, dengan bertitik tolak dari penerimaan proklamasi dan konstitusi sebagai bekal dasar subyek ini, serta dengan mempertimbangkan kepentingan nasional secara wajar dan cukup menyeluruh, maka pilihan itu tidak dapat lain kecuali kepada 'kontinuitas sejarah'. Bila ini diterima, masalahnya tinggallah menangani apa-apa saja yang sangat menentukan di dalam usaha memperjuangkan kontinuitas itu, dari satu pihak tanpa masuk kembali kepada arkaisme, dari lain pihak tidak terjerumus kepada futurisme radikal, yang dapat mengakibatkan keterpecahan bangsa ini dari dalam: keterpecahan Indonesia sebagai subyek budaya. Bila masalah nilai-nilai budaya bangsa dan masalah generasi muda kita tempatkan di dalam persepsi ini, maka akan disadari betapa pentingnya soal tersebut.

Situasi kulturil yang kita hadapi itu dapat dipecahkan berdasarkan atas azas akulturasi. Kita menyadari betapa akulturasi telah selalu menjadi daya yang nampak di dalam perkembangan sejarah Indonesia dari masa ke masa. Kita harap daya tersebut akan tetap bekerja pula pada saat ini. Kestarian sejarah bangsa dan negara kita merupakan thema yang bagaimanapun harus kita pikirkan, khususnya menjelang tahun 80-an, 90-an.

Di dalam konteks ini menjadi semakin jelas betapa pentingnya pendidikan nasional. Dengan pendidikan, digaraplah perkembangan sumber daya manusia. Dengan pendidikan dapat dikerjakan mobilisasi manusia sebagai daya dan kekuatan sejarah bangsa dan negara ini. Dengan pendidikan dilaksanakanlah akulturasi.

Sesungguhnya falsafah, tujuan maupun azas-azas pendidikan nasional, yang sampai saat ini telah menjadi konsensus bersama, telah diletakkan pada basis-basis yang tepat. Pendidikan nasional didasarkan atas Pancasila. Pendidikan nasional mengikuti azas pendidikan seumur hidup, yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah, yang menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah dan yang diintegrasikan dengan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa kita memiliki konsep pendidikan nasional yang tidak sempit, dan dengan demikian terdapat *strategic flexibility* di dalam merencanakan mobilitas sumber daya manusia itu, secara jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Dimungkinkan pula adanya diversifikasi yang akan dapat melahirkan berbagai macam respons yang dinamik. Yang masih menjadi sumber kerawanan di bidang pendidikan ini kiranya adalah pelaksanaannya. Bila setiap tahun secara kronis masalah pendidikan masih selalu menjadi persoalan yang menggelisahkan, maka titik beratnya bukan kepada soal konsep dasarnya, melainkan pada pelaksanaan dari konsep dasar tersebut.

Satu bidang yang memerlukan evaluasi adalah masalah SD Inpres. Secara kuantitatif perluasan SD Inpres memang merupakan satu fenomena yang sangat besar artinya. Namun demikian ditinjau dari segi kualitatif dan efektivitas edukasi serta ditinjau dari konsekwensi sosial kulturilnya untuk masa depan, masalahnya dapat menjadi menggawat. Bagi masyarakat yang sedang membangun dan yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar seperti Indonesia ini, maka penjabaran pelaksanaan konsep dasar pendidikan nasional itu harus lebih pragmatis sifatnya. Tekanan mungkin justru ditempatkan kepada masalah membuat anak didik ataupun peserta didik dapat hidup dan dapat berkembang terus. Mereka harus membuat berputarnya roda-roda masyarakat.

Soalnya sekarang ini tentu saja adalah mengadakan *adjustment*, supaya apa yang sudah terjadi dapat diakomodir dengan langkah-langkah yang lebih sesuai dengan pendekatan yang pragmatis. Untuk ini adanya SD-SD Inpres kita terima dan masalahnya tinggallah bagaimana membuat supaya SD-SD yang telah ada itu menjadi baik dan terus menjadi baik. Tentu saja perlu menempatkan SD-SD itu di dalam konteks pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Sekolah Dasar harus dipandang sebagai tempat di mana diberikan infrastruktur dasar perkembangan (*basic human infrastructures*) manusia

Indonesia. Semakin pendidikan meningkat, semakin perlu ada diversifikasi. Harus ada 'bhineka tunggal ika'. Diversifikasi pada apa yang biasa dinamakan 'secondary level of education' akan sangat perlu, ditinjau dari masalah sosial ada kulturilnya. Masyarakat yang membangun seperti Indonesia ini akan lebih memerlukan tenaga-tenaga menengah. Bahaya bisa terjadi apabila perluasan di tingkat pertama itu akan per se mengakibatkan perluasan di lapisan selanjutnya, tanpa memperhatikan masalah diversifikasi dalam arti yang strategis.

Pendidikan Pancasila tentu saja menjadi semakin penting. Hal ini juga harus ditempatkan di dalam konteks yang tepat. Berbicara mengenai Pancasila akan lebih banyak tanpa arti kalau tidak didasarkan atas persepsi yang tepat. Pendidikan Pancasila harus ditempatkan di dalam konteks historitas bangsa dan negara ini. Pancasila baik sebagai pandangan hidup bangsa maupun sebagai dasar negara adalah sumber dinamik di dalam historitas itu. Harus diakui bahwa saat ini orang dapat berbicara dengan lebih puas secara akademis mengenai Marxisme, Sosialisme ataupun Kapitalisme, akan tetapi tidak dapat berbicara secara puas secara akademis mengenai Pancasila sebagai ideologi. Skepsis dan sinisme mengenai dasar negara kita menjadi gejala yang semakin meluas. Ini perlu diatasi.

Karena pendidikan merupakan masalah yang sangat dekat dengan kepentingan masyarakat, maka penjabaran kebijaksanaan dasar Pemerintah mengenai politik pendidikan nasional itu hendaknya disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Kegelisahan masyarakat, keraguan masyarakat bahkan skepsis masyarakat mengenai sistem pendidikan nasional harus diredakan dengan komunikasi dari mereka yang mempunyai tugas menjabarkan konsep pendidikan nasional tersebut, dengan pengandaian bahwa cukup dikuasai masalah-masalah dan jalan-jalan yang akan ditempuh.

Secara prinsipil kedudukan perguruan swasta di Indonesia sudah tidak banyak perlu dimasalahkan. Azas tanggung jawab pendidikan pada tiga komponen kiranya sudah menjadi paham nasional. Hal ini juga dikuatkan oleh konsep ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional harus merupakan ketahanan masyarakat. Perguruan swasta adalah potensi, bahkan mempunyai dinamika. Persoalan-persoalan memang lebih diakibatkan oleh penjabaran teknisnya.

Salah satu sumber kerawanan kronis yang dialami masyarakat Indonesia adalah agama atau bidang spiritual pada umumnya. Karena itu sesungguhnya diperlukan diagnosa yang fundamental dan terapi yang radikal, sehingga sumber ketegangan dan konflik yang cukup menahun itu dapat ditangani dengan baik.

Salah satu penjelasan yang mungkin akan mempermudah pendekatan kepada persoalan ini adalah bahwa di sini agama sangat berhimpitan dengan politik. Agama dipandang sebagai sumber kekuasaan, dan juga menjadi alat untuk kekuasaan. Hal ini sudah menggejala sejak jaman dahulu kala, bahkan jauh sebelum agama Kristen ataupun agama Islam masuk ke dalam sejarah. Ini menggejala di dalam apa yang dinamakan ajaran 'Raja Dewa', yang kemudian diteruskan dengan ajaran theokrasi. Masalahnya adalah soal kedaulatan: siapakah yang memegang kedaulatan itu? Ini tentu saja berhubungan erat dengan masalah siapakah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan jawabannya tentulah Yang Maha Kuasa. Jadi persoalan selanjutnya adalah siapakah yang mewakili atau diberi wewenang oleh Yang Maha Kuasa itu? Di sinilah terdapat berbagai jawaban: Rajalah yang diberi wewenang oleh Tuhan, sebab dengan ia menjadi raja itu adalah tanda bahwa ia dipilih oleh Tuhan (atau bahkan ia titisan Yang Maha Kuasa itu sendiri). Ajaran lain adalah: agamalah yang menentukan kedaulatan itu, sebab agama itu diturunkan oleh Tuhan sendiri. Maka agama menjadi sumber segala kedaulatan di dunia ini.

Berdasarkan persepsi yang demikian itu maka agama telah menjadi gejala kekuasaan, gejala kedaulatan. Dan sejarah mencatat banyak abnormalitas kemanusiaan berkenaan dengan persepsi ini: agama menjadi sumber konflik, bahkan manusia satu membunuh manusia lain. Agama tidak lagi mencerminkan kekuatan spiritual di dalam sejarah. Dengan ini sesungguhnya agama telah dijadikan jauh dari Tuhan maupun dari manusia. Di dalam alam yang demikian ini, yang masih terdapat di masyarakat kita, maka banyak orang bermain kekuasaan berdasarkan atas agama: agama menjadi dalih politik, agama menjadi permainan politik. Dari sinilah timbul konflik-konflik baik antara umat satu agama, antara umat agama satu terhadap yang lain, antara umat beragama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan, maupun antara negara dan agama.

Dengan Pancasila Persepsi tersebut dijauhkan. Pancasila tidak mau mempersoalkan agama mana yang paling benar, yang paling berdaulat. Pancasila tidak menganut azas agama sebagai sumber kedaulatan. Negara Indonesia bukanlah negara agama. Akan tetapi di dalam negara ini agama dihormati; di negara ini dimungkinkan bentuk-bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan, dihormati kebebasan agama dan kepercayaan, dihormati kebebasan beragama dan berkepercayaan. Bila sikap dasar ini dapat berkembang, maka dengan sendirinya yang akan menjadi keprihatinan adalah kepentingan bersama sebagai bangsa, sebagai warga negara. Kerukunan antara umat beragama dan berkepercayaan akan berkembang tanpa dengan ambivalensi.

Perkembangan Majelis Ulama, Majelis Agung Waligereja, Dewan Gereja Indonesia maupun Sekretariat Bersama aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesungguhnya merupakan phenomen yang penting. Ia dapat menjadi alat untuk memberikan penyembuhan kerawanan kronis itu secara struktural. Dengan lembaga-lembaga tersebut akan berarti bahwa apa yang dinamakan agama dan kepercayaan itu lebih dipandang sebagai lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga "sui iuris". Lembaga-lembaga keagamaanlah yang harus menangani masalah-masalah keagamaan. Negara menjamin, menghormati dan sejauh kemampuan memberikan bantuan-bantuan. Bila ini dapat berkembang baik, maka masalah-masalah seperti pendidikan agama juga akan lebih wajar pemecahannya. Pendidikan agama ataupun kepercayaan pertama-tama adalah tanggung jawab keluarga dan kemudian tanggung jawab masing-masing lingkungan keagamaan atau kepercayaan itu sendiri. Dengan perkataan lain pendidikan agama pertama-tama dilakukan di dalam keluarga-keluarga, dan di samping itu menjadi urusan lembaga-lembaga agama, sebagai kegiatan swasta. Ini akan membawa akibat bahwa sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, akan menjadi lebih workable: Ia akan merupakan sistem bagi setiap warga negara tanpa melihat perbedaan-perbedaan agama, kesukuan, sosial, daerah, keturunan. Pendidikan nasional akan merupakan sarana untuk mengembangkan manusia-manusia Indonesia. Ini tidak berarti bahwa kebebasan agama dan kebebasan beragama di dalam negara ini dilanggar. Kebebasan itu tetap dihormati, hanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sesuai dengan fungsi dan proporsinya.

Adapun mengenai radikalisisasi gerakan di kalangan agama hal ini juga mudah dapat dipahami. Pertama, seperti dikemukakan di atas, agama masih dipandang sebagai sumber kekuasaan. Dan kekuasaan selalu mau bergerak secara kuat. Kedua, dengan memudarnya Marxisme/Komunisme/Leninisme, maka di Indonesia agama menjadi kekuatan pembentuk ikatan maupun gerakan. Dari agama ataupun sumber spiritual, manusia memperoleh rasionalisasi dan motivasi untuk bergerak di dalam bidang kemasyarakatan.

Satu catatan perlu dikemukakan berkenaan dengan masalah teknologi. Kadang-kadang orang melihat teknologi sebagai satu hal yang destruktif sifatnya, terutama apabila dikaitkan dengan masalah kekuatan kapitalisme, industri, sampai kepada masalah pemisahan antara kaya dan miskin. Teknologi banyak dilihat sebagai alat dari kekuatan kapitalis, alat dari kekuatan elite politik maupun elite ekonomi. Alam pikiran itu dapat menumbuhkan suatu escapisme kulturil, yaitu sikap lari, sikap tertutup terhadap teknologi. Sikap demikian ini dapat terwujudkan di dalam berbagai macam bentuk. Kadang-kadang desakan untuk menjauhkan segala macam teknologi tinggi banyak berkaitan dengan sikap escapistik itu.

Bagaimanapun kita tidak mungkin lari dari kenyataan sejarah dunia ini. Satu-satunya pilihan adalah menghadapinya dengan realisme. Jadi masalah ini harus kita tempatkan pada konteks Indonesia di dalam sejarah dunia.

Analisa kulturil menunjukkan bahwa justru di bidang teknologi ini masyarakat kita masih lemah, padahal menjadi semakin kentara bahwa teknologi adalah salah satu kekuatan pokok yang menentukan sejarah dunia ini. Situasi ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa Indonesia saat ini harus mampu menyelesaikan tugas akulturasinya di bidang teknologi. Teknologi harus dijadikan bagian perkembangan masyarakat itu sendiri dari dalam. Hal ini nampaknya sudah semakin disadari. Kalau teknologi tidak merupakan bagian perkembangan instrinsik dari masyarakat, maka akibatnya adalah proses ketergantungan yang makin lama makin menjadi, yang tentu saja akan mempunyai akibat-akibat banyak sekali di bidang politik, ideologi, keamanan, pertahanan, ekonomi, budaya dan sosial.



Kalau problem teknologi itu sudah ditempatkan di dalam konteks akulturasi, maka orang tidak lagi perlu mempertentangkan secara dogmatik dan deterministik antara teknologi tinggi di satu pihak dengan teknologi madya ataupun teknologi tradisional di lain pihak. Masalahnya adalah pemilihan secara tepat sehingga yang justru akan merupakan kaitan dengan yang lain. Ini akan meminta adanya perencanaan pembangunan nasional atas dasar konsep yang lebih terpadu, bagaikan roda-roda yang saling berkaitan, yang membuat berputarnya masyarakat nusantara. Masalah bahasa dan kesenian kiranya juga mencerminkan situasi kulturil dan sosial yang sedang berada di dalam transisi.

Di dalam sejarah kebudayaan Indonesia, bahasa selalu menjadi parameter akulturasi. Situasi bahasa kita dewasa inipun nampaknya menunjukkan gejala tersebut. Akulturasi yang harus menyelesaikan problema ekonomi, pengetahuan dan teknologi, menggejala di dalam trend pemakaian bahasa yang baik dan tepat. Disiplin, presisi dan akurasi menjadi titik berat.

## PENUTUP

Ada beberapa pemikiran yang perlu dikemukakan di dalam mengakhiri catatan-catatan umum ini.

Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa semakin lanjut tahap-tahap kita di dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka masalah-masalah sosial dan budaya akan menjadi semakin dominan secara eksplisit. Di dalam fase-fase sebelumnya, masalah-masalah sosial dan kebudayaan biasanya lebih bersifat implisit.

Ditinjau dari logika pembangunan, maka kedua bidang tersebut memang merupakan inti-inti pembangunan masyarakat. "Entwicklung is ein Kulturwandel",<sup>1</sup> pembangunan adalah satu jalan budaya. Kalau tujuan pembangunan itu adalah kesejahteraan, maka kalimat tersebut dapat diterjemahkan menjadi: untuk mencapai kesejahteraan, kita lalui jalan kulturil.

---

<sup>1</sup>Proposisi tersebut adalah salah satu thesis dari Richard F. Behrendt, di dalam "Soziale Strategie fur Entwicklungsländer".

Itulah sebabnya mengapa saat sesudahnya menyelesaikan Pelita I dan II, serta menjelang memasuki Pelita III akan merupakan satu periode yang kritis. Masalah sosial mulai terungkap, demikian pula masalah kebudayaan. Karena itu masalah-masalah sosial dan budaya banyak mewarnai perkembangan tanah air sepanjang tahun 1976.

Kenyataan itu juga berarti bahwa masalah sosial dan budaya akan menjadi bahan-bahan utama di dalam kehidupan politik. Kekuatan politik manapun, organisasi politik apapun akan harus berhadapan dengan masalah sosial dan kebudayaan itu. Dari satu pihak ini berarti bahwa perpolitikan di Indonesia akan bisa berkembang menjadi lebih pragmatis. Dari lain pihak, mengingat luas dan kompleksnya masalah, situasi tersebut juga dapat melahirkan kondisi terjadinya proses perpecahan dan konflik. Masalah sosial dan budaya yang kompleks dan penuh dengan lingkaran setan akan selalu dapat menjadi bahan permainan politik yang sangat lapang. Hal ini akan mempunyai refleksinya terhadap masalah stabilitas nasional, khususnya masalah persatuan dan kesatuan. Di dalam situasi ini dapat tumbuh berbagai macam inspirasi, motivasi maupun aksi-aksi reformasi.

Berhubungan dengan itu perlu dikemukakan beberapa catatan mengenai gejala radikalisme. Menajamnya masalah sosial dan budaya di dalam masyarakat dapat mengakibatkan tumbuhnya bermacam-macam teori sosial maupun gerakan-gerakan sosial. Kesemuanya bersifat 'reformis', 'soteris', dalam arti mau memberikan penyelamatan kepada situasi, mau memberikan pemecahan persoalan, mau membawa pembaharuan. Hal ini bisa menggejala di dalam teori-teori kritik. Juga dapat terwujud di dalam gerakan-gerakan kontra terhadap strategi, perencanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Orang akan membuat peta-peta lini antara status quo dan perubahan, antara establishment dan anti-establishment. Situasi ini menumbuhkan adanya kelompok-kelompok konservatif, kelompok moderat, dan kelompok futuristik. Ada yang bersifat utopis, ada yang bersifat radikal. Di dalam konteks pembangunan, di mana secara sadar diinginkan kemajuan, gejala radikalisme akan lebih terasa datangnya dari kelompok futuristik. Namun demikian melihat perkembangan yang ada sampai saat ini perlu sekali kiranya diadakan sedikit studi mengenai corak serta kadar gejala radikalisme ini: apakah ia satu gejala masyarakat yang menyeluruh dan mendasar (sehingga sungguh

dapat dinamakan gejala radikalisme kerakyatan menyeluruh); ataukah ia gejala lain, yang tidak demikian itu.

Gejala radikalisme sampai saat ini nampaknya masih terbatas pada lingkungan elite, baik itu elite politik, elite intelektual ataupun elite spiritual. Maka gejala radikalisme ini mungkin sekali masih berada di sekitar konteks politik dan konteks elit di dalam masyarakat kita. Maka itu walaupun argumentasi yang dikemukakan banyak menggunakan kerakyatan -- bahkan nada proletariatsme -- masih selalu dipermasalahkan apakah gejala radikalisme itu sungguh-sungguh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sementara itu kebanyakan argumentasi dan analisa yang mendukung gejala radikalisme ini, terutama yang bercorak akademis, banyak sekali mempunyai kemiripan dengan aliran-aliran yang terdapat di Barat, khususnya Eropa, pada saat ini. Salah satu dari aliran ini adalah apa yang dikenal sebagai gerakan Neo Marxisme.

Adapun mengenai Neo Marxisme ini dapat dikatakan bahwa aliran itu pada hakekatnya adalah satu aliran pemikiran, dan belum menjadi satu organisasi fisik. Aliran ini sesungguhnya adalah pencerminan dari masyarakat Eropa yang sedang mengalami masa transisi yang besar. Aliran ini adalah aliran yang mencerminkan sikap tidak puas: tidak puas terhadap Komunisme, tidak puas terhadap Kapitalisme, tidak puas terhadap sumber-sumber nilai, dan menginginkan adanya masyarakat baru yang humanistik, manusiawi. Mengenai apa itu 'manusiawi' memang belum terdapat kristalisasi konsep maupun institusinya yang operasional. Maka itu aliran ini adalah aliran yang sifatnya ingin merubah, yang kadang-kadang disebut anti-establishment. Dari beberapa penganut aliran ini ada yang kemudian menerapkan pemikirannya menjadi lebih luas, tidak saja tertuju terhadap situasi di Eropa, melainkan juga kepada situasi di luar Eropa, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Salah satu pola pemikiran yang nampaknya banyak mempengaruhi pemikiran di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan kapitalisme, industri, teknologi, pasar, pola konsumsi dan perpecahan sosial dan politik di negara-negara berkembang sebagai akibat dari kekuatan-kekuatan kapitalisme dan kekuatan-kekuatan industri tersebut. Sebagai kita lihat tema-tema yang banyak dibicarakan di Indonesia dewasa ini antara lain adalah modal asing, multi-national corporation, teknologi, pola konsumsi dan

perpisahan antara yang kaya dan yang miskin. Maka kiranya dapat juga dipertanyakan apakah gejala-gejala radikalisme, terutama dari lingkungan akademis itu, bukan pencangkokan dari alam pikiran yang terjadi di Eropa dewasa ini.

Pertanyaan itu tidak berarti bahwa dengan demikian masalah sosial dan budaya bukan lagi masalah besar dan harus diberi perhatian. Masalahnya tentu saja mengenali situasi tersebut lebih tepat dan mencari pemecahan. Orang memang sedang ditantang untuk dapat menemukan pola harmonis antara perubahan, perkembangan dan kesejahteraan. Kembali kepada apa yang sudah dikemukakan di muka maka akulturasi akan menjadi satu hal yang penting. Dengan prinsip akulturasi itu yang dimaksud adalah azas perkembangan masyarakat Indonesia sendiri sebagai subyek, yang memperkaya diri dengan unsur-unsur dari luar, secara selektif. Azas ini perlu kita laksanakan baik di bidang ekonomi, teknologi, pengetahuan, politik, bahasa, kesenian. Ia juga akan mempunyai efek terhadap penghayatan keagamaan ataupun kepercayaan.

Dengan azas akulturasi tersebut kita secara sadar juga lebih menjadi bagian dari sejarah dunia, sejarah bangsa-bangsa. Ini kiranya harus menjadi semakin penting, terutama karena perkembangan sejarah dunia, dengan interrelasi dan interdependensi yang semakin kompleks itu, membuat manusia menuju kepada satu sistem global. Secara sosial maupun secara kultural kita mesti siap untuk menjadi salah satu subyek di dalam sistem tersebut.

Apakah dengan menonjolnya bidang sosial dan budaya itu berarti ekonomi tidak menjadi prioritas lagi? Nampaknya belum berarti bahwa dengan demikian pembangunan ekonomi harus mundur ke belakang. Pembangunan ekonomi masih tetap merupakan infrastruktur dasar untuk pembangunan nasional itu. Ia tetap infrastruktur dasar untuk pembangunan sosial dan pembangunan budaya. Yang harus dihindari bukanlah menempatkan ekonomi sebagai prioritas pertama, akan tetapi cara pendekatan kepada pembangunan secara sempit yang diakibatkan oleh determinisme ekonomi. Di dalam pendekatan terhadap pembangunan haruslah digunakan sikap yang terbuka, memperhitungkan segala dimensi serta aspek pembangunan.

Pembangunan ekonomi tetap merupakan urgensi pertama (tetapi tidak boleh mengadakan pendekatan terhadap pembangunan sosial itu dengan determinisme ekonomi); masalah sosial dan budaya akan menjadi semakin terasa ke depan;

Indonesia semakin akan terlibat ke dalam sejarah dunia yang menuju kepada suatu sistem global. Di dalam semua ini imbangan antara efficiency dan equity akan semakin tajam, dan azas akulturasi adalah sangat penting. Azas ini akan bertepuk dengan konsep pembangunan nasional maupun konsep ketahanan nasional.

Pada tahun 1977 nanti di Indonesia akan dilaksanakan pemilihan umum kedua selama sejarah Orde Baru ini. Menonjolnya masalah sosial dan budaya kiranya akan memberi warna kepada situasi pemilihan umum di Indonesia. Kalau masalah sosial selama tahun 1976 ini sudah cukup banyak dikontroversikan, kemungkinan besar di tahun 1977 nanti masalah kebudayaan akan banyak menjadi bahan kontroversi, khususnya berkenaan dengan perubahan nilai, generasi muda, pendidikan, agama, kepercayaan, etika dan moralitas.

Semua ini sesungguhnya membawa hikmah yang perlu kita baca. Dengan berkembangnya segala persoalan selama tahun 1976 tanpa membawa akibat-akibat politik yang merusak, telah bangkit pusat-pusat pemikiran yang ingin ikut serta memecahkan masalah pembangunan nasional ini. Periode mendatang di Indonesia ini akan lebih menyerupai periode Yunani kuno pada jaman akhir Perikles, di mana akan terjadi transisi besar, di mana terjadi krisis-krisis menyeluruh, di mana dibutuhkan usaha-usaha besar, pemikir-pemikir besar, ahli-ahli analisa yang semakin cakap, dan pemimpin-pemimpin yang mampu menyatukan seluruh potensi nasional itu, serta memberi kesempatan kepada potensi-potensi tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat nusantara ini. Tugas sosial yang dipikul bangsa ini adalah inti dari cita-cita mengisi kemerdekaan. Kemampuan kultural bangsa ini akan menentukan apakah tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Kita percaya akan adanya bakat-bakat kultural yang melekat pada bangsa ini. Tantangan memang berat. Tetapi apa yang dikemukakan oleh George M.T. Kahin di dalam penutup pada bukunya 'Nationalism and Revolution in Indonesia' perlu kita camkan bersama-sama "Whatever the case, if in attempting to solve their great post revolutionary problems the Indonesian people were able to demonstrate the same qualities which they had shown in their struggle for political independence, their chances of success appeared strong".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>George Mc. Turnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (1961) p. 480